

**HUBUNGAN KESADARAN POLITIK DAN *CIVIC DISPOSITION* DENGAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM
PILKADES DI DESA KLODRAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2016**

Oleh

Dian Yuliani

Sugiaryo

Progdi PPKn FKIP UNISRI Surakarta

ABSTRAK

Dian Yuliani. **HUBUNGAN KESADARAN POLITIK DAN *CIVIC DISPOSITION* DENGAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PILKADES DI DESA KLODRAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016**. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi, Juli 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kesadaran politik dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkades di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016; 2) Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan *civic disposition* dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkades di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016; 3) Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kesadaran politik dan *civic disposition* dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkades di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif, yaitu mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilih pemula masyarakat Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016, yakni 383. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu simple random atau cara pengambilan sampel secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam teknik ini adalah teknik angket atau kuisioner. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang kesadaran politik, *civic disposition* dan partisipasi politik. Dalam penelitian ini validitas yang dicari adalah validitas eksternal dan reliabilitas yang dicari adalah reabilitas internal. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi ganda.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai F hitung > F table ($67.536 > 3.090$) jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan yang positif dan signifikan kesadaran politik dan *civic disposition* dengan partisipasi politik pemilih pemula di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, terbukti kebenarannya.

Kata Kunci: Kesadaran politik, *Civic Disposition*, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Dian Yuliani. **CORRELATION OF POLITIC AND CIVIC DISPOSITION WITH PARTICIPATION OF BEGINNER VOTER IN SUB DISTRICT MAJOR ELECTION AT KLODRAN, COLOMADU, KARANGAYAR IN 2016.** Thesis. Surakarta: Theacer Training and Education Faculty Slamet Riyadi University, July 2017.

This reserach has purpose: 1) to know whether there is correlation between politic awareness and politic participation of beginner voter in te election of sub district major at Klodran, Colomadu, Karanganyar in 2016; 2) to know whether there is correlation between civic disposition and politic participation of beginner voter in te election of sub district major at Klodran, Colomadu, Karanganyar in 2016; 3) to know whether there is correlation between politic awareness and civic disposition with politic participation of beginner voter in te election of sub district major at Klodran, Colomadu, Karanganyar in 2016.

The method used in this reserach was explanative method, finding correlation between independent variable and dependent variable. Population in this research was beginner voter of Klodran, Colomadu, Karananyar in 2016, with total number 383. Sample in this research was collecting data, the researcher used questionnaire. Questionnaire was used to collect data of politic awareness, civic disposition and politic participation. In tis research, external validity and internal reability were found. In analyzing data, the researcher used double correlation technique.

Based on te result of te research, it was found that Fobservation > Ftable ($67,536 > 3.090$) so that it can be concluded there is significance positive correlation of politic awareness and civic disposition with politic participation of beginner voter in Klodran, Colomadu, Karanganyar was proved to be the truth.

Keywords: Politic Awareness, Civic Disposition, Politic Participan, Beginner Voter, Sub District Major Election

PENDAHULUAN

Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Di Indonesia, partisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”, dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih, hak dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan dan lain-lain.

Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151), “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Dalam partisipasi politik, pengetahuan dan pemahaman sangat diperlukan, karena sebagai warga negara atau individu tentunya harus mengetahui dan memahami mengenai masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga diperlukan dalam partisipasi politik karena dapat menyadari akan tanggung jawab sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Pengetahuan dan pemahaman politik dituangkan melalui wujud kesadaran politik dalam partisipasi politik. Kesadaran politik akan memunculkan

peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

Surbakti (2010: 144) berpendapat bahwa, “Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara”. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

Sikap dan tindakan seorang warga negara yang demokratis didukung pula oleh kompetensi kewarganegaraan, yaitu *civic disposition*. *Civic disposition* yang merupakan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama dalam demokrasi memiliki peran yang penting sebagai aspek pendukung partisipasi politik. *Civic disposition* perlu dimiliki oleh seseorang warga negara agar menjadi cerdas, berkarakter, dan partisipasif.

Perwujudan partisipasi politik yang terkecil dalam suatu daerah yaitu ditunjukkan dengan adanya Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat “Pilkades”. Pilkades mungkin bukan istilah asing untuk saat ini. Pilkades sebagai sarana penggantian atau kelanjutan pemerintahan desa, yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu.

Menurut Wasistiono (2006: 32) tentang pemilihan desa menyatakan bahwa, “Apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintahan, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan masyarakat desa”.

Kategori pemilih atau partisipan pun beragam. Termasuk kategori pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yakni warga negara Indonesia yang genap

berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah pernah menikah. Pemilih pemula yang masih berusia 17 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya erat kaitannya dengan *civic disposition* yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, karena pemilih pemula secara umum masih berstatus sebagai pelajar yang menerima mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus tidak terlepas pula dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan di luar jalur sekolah yakni lingkungan.

Moment pemilihan kepala desa ini dapat dijadikan tolak ukur menilai partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana Pilkades yang diadakan di Desa Klodran, Colomadu, Jawa Tengah pada bulan November tahun 2016. Dimana yang terpilih adalah Warsito, SE., MM dengan disusul oleh Nawang Wulan Indriastuti. Jika dilihat jumlah pemilih dalam pemilihan desa, menurut Wahyu Djarot, panitia pemilihan kepala desa,

daftar pemilih tetap dalam pilkades ini sejumlah 3.710 orang, dimana sekitar 400 orang adalah pemilih pemula. Sedangkan warga yang tidak hadir sejumlah 1179. Ini berarti hanya 69% tingkat partisipasi masyarakat yang memilih dalam pemilihan kepala desa.

Belum optimalnya partisipasi ini menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di semua wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi politik ini juga bisa menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa yang akan datang. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih tidak memilih. Penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi penjelasan itu berdasarkan pengamatan bukan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin masyarakat tersebut melalui pemilu (pilkades), namun hal lain

yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kata lain ketidakhadiran mereka dalam pilkades bukan disebabkan karena sistem pilkades yang tidak demokratis.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak selalu diserahkan pada satu pihak, diperlukan keikutsertaan komponen bangsa untuk menangani masalah ini, karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan demokrasi yang dapat mendukung pembangunan bangsa.

METODE PENELITIAN

Kuesioner (Angket)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuesioner (angket). “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab” (Sugiyono. 2012: 142).

Selain itu Sugiyono mengatakan “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden”.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 151), “Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya”. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan angket tertutup secara langsung yaitu orang yang dikenai angket harus memilih jawaban yang telah disediakan dalam angket.

Dari penjelasan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner (angket) merupakan teknik atau cara dalam mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan ataupun pernyataan secara tertulis yang nantinya akan dijawab oleh responden. Fungsi kuesioner ini berguna untuk mendapatkan data yang akurat melalui responden secara tertulis.

Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner (angket) berstruktur, karena:

- a. Responden adalah subjek yang telah dapat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga tidak perlu perantara orang lain.
- b. Dalam waktu yang relatif singkat dapat dikumpulkan data yang diperlukan.
- c. Memudahkan bagi responden dalam menjawab, karena hanya memberi tanda ceklis (✓) pada alternatif jawaban yang dianggap sesuai.

Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 236), metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapot, legger dan agenda dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah suatu penyelidikan

yang ditujukan data yang telah lalu melalui data dokumentasi.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesadaran politik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan partisipasi politik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis data, nilai r_{xy} (r_{hitung}) = 0,732 lebih besar daripada nilai r_{tabel} = 0,196. Dengan demikian, apabila kesadaran politik ditingkatkan, maka partisipasi politik akan meningkat. Sebaliknya, apabila kesadaran politik menurun, maka partisipasi politik juga menurun.

Variabel *civic disposition* dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan partisipasi politik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis data, nilai r_{xy} (r_{hitung}) = 0,887 lebih besar daripada nilai r_{tabel} = 0,196. Dengan demikian, apabila *civic disposition* ditingkatkan, maka partisipasi politik akan meningkat. Sebaliknya, apabila *civic disposition*

menurun maka partisipasi politik akan menurun. Jadi hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan kesadaran politik dan *civic disposition* dengan partisipasi politik.

PEMBAHASAN

Budiardjo (1988: 22) berpendapat bahwa, “Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Dalam penelitian ini, tanda masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan atau pembangunan terlihat pada keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa. Keikutsertaan dalam kegiatan politik tersebut (pilkades) baik karena arahan langsung maupun kesadaran secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ruslan (2000: 96), yang mengatakan bahwa cara seseorang untuk mencapai kesadaran politik adalah melalui arahan politik, pengalaman politik,

kesadaran mandiri yang muncul dari membaca koran, buku-buku tentang politik, mengikuti berbagai peristiwa.

Tidak semua pemilih pemula memiliki kesadaran politik yang baik, karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhi. Seperti kemampuan dan kecakapan masing-masing individu. Keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa juga harus mengedepankan sikap demokratis.

Sikap ini didukung oleh kompetensi kewarganegaraan, yang disebut *civic disposition*. *Civic disposition* merupakan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama dalam demokrasi memiliki peran yang penting sebagai aspek pendukung partisipasi politik. Budimansah dalam Winarno (2014: 179) mendeskripsikan bahwa karakter kearganegaraan terdiri atas karakter privat dan karakter publik, seperti menjadi masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal

kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, berpartisipasi dalam urusan urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana dan mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat *Civic disposition* perlu dimiliki oleh seseorang warga negara agar menjadi cerdas, berkarakter, dan partisipatif.

Pemilih pemula yang ikut serta dalam pemilihan kepala desa dinilai sudah memiliki karakter publik yang baik. Karena menunjukkan bahwa terdapat kepedulian sebagai warga negara. Selain itu, keikutsertaan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa menunjukkan juga bahwa terdapat rasa tanggung jawab politik secara personal.

Karakter kewarganegaraan ini didapatkan melalui pendidikan kewarganegaraan baik di sekolah maupun dilingkungan. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik ini tidak hanya sekedar dalam pemilihan umum tetapi juga

dalam interaksi terhadap masalah publik, seperti berdiskusi, bernegosiasi dan mengelola konflik dengan baik.

Menurut Sastroatmodjo (1995: 86), fungsi partisipasi adalah sebagai pendukung program-program pemerintah, sebagai sarana menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, juga sebagai kontrol terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat mendasari seorang pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa.

Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yakni warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah pernah menikah. Pemilih pemula yang masih berusia 17 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya erat kaitannya dengan *civic disposition* yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, karena pemilih pemula secara umum masih

berstatus sebagai pelajar yang menerima mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus tidak terlepas pula dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan di luar jalur sekolah yakni lingkungan.

Kesadaran politik dan *civic disposition* memiliki peran yang penting dalam bergeraknya sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan demikian dapat peneliti kemukakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan kesadaran politik dan *civic disposition* dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Tahun 2016.

Saran

Kesadaran politik dari hasil penelitian menunjukkan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan partisipasi politik, untuk itu agar dapat memaksimalkan kesadaran politik, hendaknya pemerintah desa dapat melakukan sosialisasi politik baik melalui arahan secara langsung maupun melalui kegiatan dialog-dialog dengan masyarakat.

Civic disposition dari hasil penelitian menunjukkan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan partisipasi politik, untuk itu agar dapat mengoptimalkan nilai-nilai *civic disposition* dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya pemerintah desa turut melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa, seperti mengelola konflik yang ada di desa dan memantau persoalan desa.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ruslan, Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia.
- Sastroatmodjo, Sudjino. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Siregar, Sofian, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif SPSS*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sugiyono. 2010 *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Cetakan ke-4, Jakarta: PT. Grasindo.
- Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Winarno 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan ke-4, Jakarta : PT. Grasindo